

PENGARUH PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Made Denny Oktariyana

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Kupang
E-mail: dennyoktariyana@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh, penatausahaan Badan Milik Daerah (pembukuan, inventarisasi dan pelaporan) terhadap pengamanan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi NTT. Jenis penelitian ini kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi meliputi pegawai di Badan Pendapatan dan Aset Daerah Prov. NTT, Biro Pengadaan Barang dan Jasa dan Badan Perencanaan Pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling diperoleh 95 responden dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan yaitu regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah.

Kata kunci: Pembukuan, Inventarisasi, Pelaporan, Pengamanan Barang Milik Daerah

PENDAHULUAN

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, telah terjadi berbagai perkembangan dan perubahan yang mendasar dalam pengelolaan keuangan Negara. Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Sehubungan dalam ketentuan Pasal 74 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini yang dimaksud barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/APBD, dan atau yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Kemudian pengurusan dan pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Di samping itu pengurusan dan pengelolaan barang milik daerah meliputi dari perencanaan kebutuhan, penganggaran,

pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pertanggungjawaban atas barang milik daerah kemudian menjadi sangat penting ketika pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Informasi barang milik daerah memberikan sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan (neraca) yaitu berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap, maupun aset lainnya.

Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap barang milik daerah. Pengamanan tersebut meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan administratif dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian atas barang milik daerah. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di dalam perencanaan pengadaan, pemeliharaan, maupun penghapusan. Sebagaimana diketahui, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Kupang tahun

2016, 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan terdapat kelemahan Pengendalian Intern yang signifikan atas penatausahaan dan penyajian Aset Tetap yaitu kegiatan inventarisasi Aset Tetap belum memadai dan belum didukung dokumentasi yang cukup.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah menyajikan Aset Tetap pada neraca audited per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp. 6.381.894.681.395,48 dan Rp. 4.989.297.479.984,27 atau meningkat sebesar Rp. 1.392.597.201.411,21. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan aset tetap secara uji petik pada BPPKAD, Biro Umum, Dinas PUPR, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, serta Dinas Peternakan diketahui pengelolaan aset tetap belum memadai. Berdasarkan Permendagri 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dinyatakan bahwa Pengurus Barang Pengelola berwenang dan bertanggungjawab antara lain menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah. Dalam pelaksanaannya, seluruh sertifikat tanah dan BPKB milik Pemerintah Provinsi NTT disimpan di dalam brankas pada ruangan Bidang Aset. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen kepemilikan sertifikat dan BPKB pada Biro Umum dan BPPKAD diketahui bahwa tidak semua dokumen asli tersimpan dalam brankas pada Bidang Aset. Menurut keterangan Pengurus Barang Badan Pendapatan dan Aset Daerah dijelaskan bahwa belum pernah ada rekonsiliasi atas bukti kepemilikan baik atas sertifikat tanah maupun BPKB yang ada dalam brankas.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK diketahui bahwa penyusunan Laporan Aset Tetap masih dilakukan secara manual dengan Microsoft excel padahal Bidang Aset sudah bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Modul Aset. Berdasarkan keterangan dari Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset dijelaskan bahwa OPD sudah mulai melakukan input rincian aset tetap ke dalam aplikasi namun belum seluruh OPD dan masih belum dilakukan rekonsiliasi atas data yang diinput dengan nilai Aset Tetap sesuai Laporan Keuangan audited tahun anggaran 2017 sehingga pada tahun 2018 tetap menggunakan data manual.

Berdasarkan data di atas, pengelolaan barang daerah merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dengan baik agar dapat memberikan gambaran tentang kekayaan daerah, adanya kejelasan status kepemilikan, pengamanan barang daerah, peningkatan PAD dengan pemanfaatan aset daerah yang ada,

serta dapat digunakan untuk dasar penyusunan laporan keuangan. Dengan beberapa fakta yang terjadi maka sangatlah tepat jika pemerintah mengambil kebijakan dengan menetapkan beberapa regulasi yang salah satunya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 (Permendagri No.17 Tahun 2007) sehingga diharapkan dapat memperbaiki/ menyempurnakan administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang ada saat ini. Dimana regulasi seperti ini diharapkan juga akan berpengaruh terhadap pengamanan barang milik daerah yang nantinya berdampak pula terhadap mata anggaran untuk penambahan aset daerah pada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang ditentukan dari Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dapat dikurangi mengingat barang milik daerah yang lama masih layak untuk dipergunakan oleh masyarakat sebagai efek dari pengelolaan yang baik yang masih merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai yang berjumlah 130 orang pada bagian asset, sekretariat, akuntansi dan pelaporan serta para staff yang terlibat dalam proses pengamanan Barang Milik Daerah di Badan pendapatan dan aset Daerah Provinsi NTT, Biro pengadaan barang dan jasa, Badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*. Tingkat pengembalian kuesioner dalam penelitian ini sejumlah 95 kuesioner dari 130 kuesioner. Kuesioner dalam penelitian ini diukur menggunakan skala likert dengan dimensi 5. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program *Statistical Package for Social Science (SPSS)*. Persamaan regresi linear berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Penelitian ini di deskripsikan menggunakan analisis statistik deskriptif dimana analisis ini meliputi jumlah penelitian, nilai minimum, nilai maximum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi. Berikut adalah hasil analisis statistik deskriptif:

Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif

	N	Min	Max	Sum	Mean	Std. Dev
pembukuan	95	16	20	1740	18.32	1.715
inventarisasi	95	14	20	1741	18.33	1.904
pelaporan	95	19	25	2189	23.04	2.052
pengamanan_ BMD	95	24	30	2699	28.41	1.771
Valid N (listwise)	95					

Hasil uji statistik deskriptif variabel independen pembukuan penatausahaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari penyebaran kuesioner sebanyak 95 responden. Dari 95 responden yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar 16, nilai maksimum sebesar 20, nilai rata-rata (mean) sebesar 18.32 dan nilai standar deviasi sebesar 1.715.

Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel independen inventarisasi yang diperoleh dari penyebaran kuesioner sebanyak 95 responden. Dari 95 responden yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar 14, nilai maksimum sebesar 20, nilai rata-rata (mean) sebesar 17.41 dan nilai standar deviasi sebesar 1.904.

Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel independen pelaporan yang diperoleh dari penyebaran kuesioner sebanyak 95 responden. Dari 95 responden yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar 19, nilai maksimum sebesar 25, nilai rata-rata (mean) sebesar 23.04 dan nilai standar deviasi sebesar 2.052.

Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel dependen pengamanan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Provinsi NTT yang diperoleh dari penyebaran kuesioner sebanyak 95 responden. Jadi dari 95 responden yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar 24, nilai maksimum sebesar 30, nilai rata-rata (mean) sebesar 28.41 dan nilai standar deviasi sebesar 1.771.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas, keduanya memiliki distribusi normal atau tidak.

Tabel 2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		95
Normal Parameters ^{a,b}	.0000000	.0000000
	1.53537425	.22595043
Most Extreme Differences	.180	.210
	.071	.111
	-.180	-.210
Kolmogorov-Smirnov Z		1.754
Asymp. Sig. (2-tailed)		.141

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan hasil uji normalitas pada Tabel 2 diperoleh nilai Test Statistic Kolmogorov-Smirnov sebesar 1,754 dan Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,141 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa residual dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2018).

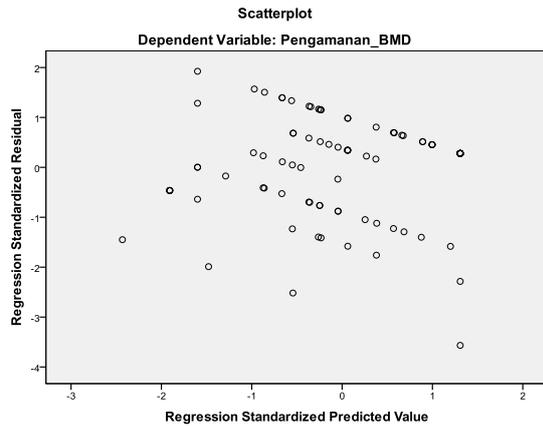
Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pembukuan_ BMD	.947	1.056
	Inventarisasi	.796	1.257
	Pelaporan	.809	1.236

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas dapat dijelaskan bahwa nilai Tolerance masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. Hal ini menunjukkan dalam model regresi tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heterokedastisitas

Grafik Scatterplot penelitian ini terlihat menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y hal ini menunjukkan tidak terjadi heteroskedestisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan masukan variabel independennya.



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas – Scatterplot

Hasil uji heteroskedastisitas dengan scatterplot menunjukkan titik-titik yang menyebar secara tidak beraturan secara acak di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y.

Uji Hipotesis

Analisis Regres Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal (variabel independen) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (variabel bebas). Adapun hasil dari analisis regresi linear berganda ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4. Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	15.359	2.397		6.406	.000
	Pembukuan_BMD	.275	.096	.266	2.852	.003
	Inventarisasi	.095	.095	.102	2.984	.000
	Pelaporan	.272	.087	.315	3.122	.002

a. Dependent Variable: Pengamanan_BMD

Model Regresi yang terbentuk berdasarkan tabel 4.16 adalah sebagai berikut:

$$Y = 6.978 + 0.275 X_1 + 0.095 X_2 + 0.272 X_3 + e$$

Berdasarkan hasil persamaan regresi berganda, masing-masing variabel menjelaskan bahwa:

1. Hasil persamaan regresi, nilai konstanta sebesar 6.978, artinya pembukuan (X1), inventarisasi (X2) dan pelaporan (X3) dianggap konstan maka tingkat pengamanan BMD konstan sebesar 6.978.
2. Koefisien regresi variabel Pembukuan (X1) sebesar 0,275 artinya penatausahaan BMD mengalami kenaikan sebesar 1% maka peningkatan terhadap pengamanan BMD sebesar 0,275 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.
3. Koefisien regresi variabel inventarisasi (X2) sebesar 0,095 artinya inventarisasi mengalami kenaikan sebesar 1% akan menyebabkan peningkatan terhadap Pengamanan BMD sebesar 0,095 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.
4. Koefisien regresi variabel pelaporan (X3) sebesar 0,272 artinya pelaporan

mengalami kenaikan sebesar 1% akan menyebabkan peningkatan terhadap Pengamanan BMD sebesar 0,272 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien Determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model untuk menerangkan variabel independen.

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary			
Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.399 ^a	.249	.224

Berdasarkan table diatas menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,224 atau 22,4 persen yang berarti bahwa 22,4 persen variasi dari Indeks Pembangunan Manusia mampu dijelaskan oleh variable Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal sedangkan sisanya 77,6%.

Uji t

Uji t dilakukan untuk menguji kebenaran yang diperoleh signifikan atau tidak. Pengujian

dilakukan dengan menggunakan signifikansi $< 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel independent terhadap variabel terikat secara parsial atau masing-masing.

Berdasarkan tabel diatas Hasil uji t (parsial) pada model regresi diperoleh hasil sebagai berikut:

Pengaruh Pembukuan Penatausahaan BMD Terhadap Pengamanan BMD

Variabel pembukuan penatausahaan BMD (X_1) sebesar $0,003 < 0,05$. Selain itu, dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara thitung dan ttabel yang menunjukkan nilai thitung sebesar 2.852 sedangkan t tabel 1.986. Dari hasil tersebut terlihat bahwa t hitung $>$ t tabel yaitu $2.852 > 1.986$, maka dapat dijelaskan bahwa H_1 diterima yang artinya secara parsial variabel pembukuan berpengaruh positif signifikan terhadap variabel pengamanan BMD Pemerintah Daerah Prov. NTT. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Choiruddin, dkk (2019), Febrianti (2016).

Hal ini sesuai dengan pengertian dari pembukuan (Permendagri 19 Tahun 2016), merupakan proses pencatatan BMD ke dalam daftar barang pengguna dan ke dalam kartu inventaris barang serta dalam daftar BMD, serta melalui proses pembukuan yang baik oleh pengguna barang maka BMD tersebut dapat dipergunakan/dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari penyerobotan pengambilalihan atau klaim dari pihak lain.

Pengaruh Inventarisasi Terhadap Pengamanan BMD

Variabel inventarisasi (X_2) sebesar $0,000 < 0,05$. Selain itu, dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara thitung dan ttabel yang menunjukkan nilai thitung sebesar 1.004 sedangkan ttabel 1.986. Dari hasil tersebut terlihat bahwa thitung $>$ ttabel yaitu $2.984 > 1.986$ maka dapat dijelaskan bahwa H_2 diterima, artinya secara parsial variabel inventarisasi berpengaruh positif signifikan terhadap variabel pengamanan BMD Pemerintah Daerah Prov. NTT. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Choiruddin, dkk (2019), dan Febrianti (2016).

Hal ini memiliki arti bahwa dengan adanya pelaksanaan yang diukur dengan indikator: pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan dan pemindahtanganan dapat meningkatkan pengamanan aset daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Sharlim dan Rahayu (2019).

Pengaruh Pelaporan Terhadap Pengamanan BMD

Variabel pelaporan (X_3) sebesar $0,002 < 0,05$. Selain itu, dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara t hitung dan ttabel yang menunjukkan nilai t hitung sebesar 3.122 sedangkan t tabel 1.986. Dari hasil tersebut terlihat bahwa thitung $>$ ttabel yaitu $3.122 > 1.986$ maka dapat dijelaskan bahwa H_3 diterima, artinya secara parsial variabel pelaporan berpengaruh positif signifikan terhadap variabel pengamanan BMD Pemerintah Daerah Prov. NTT. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Rahayu (2012), Choiruddin, dkk (2019), dan Febrianti (2016).

Permendagri No 19 Tahun 2016 disebutkan pelaporan adalah proses penyusunan laporan barang semester dan setiap tahun setelah dilakukan pembukuan dan inventarisasi. Kuasa pengguna anggaran harus menyusun laporan barang kuasa pengguna semesteran dan laporan barang kuasa pengguna tahunan untuk disampaikan kepada pengguna barang. Pengguna barang menghimpun laporan barang kuasa pengguna semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud sebagai bahan penyusunan laporan barang pengguna semesteran dan tahunan, laporan yang dimaksud digunakan sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah daerah.

PENUTUP

Penelitian ini meneliti Pengaruh pembukuan, inventarisasi dan Pelaporan terhadap Pengamanan BMD pada Badan Pendapatan Dan Aset Daerah Provinsi NTT. Berdasarkan hasil pengujian dan uji hipotesis yang telah dipaparkan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pengujian secara statistik memberikan bukti bahwa pembukuan berpengaruh signifikan terhadap pengamanan Barang Milik Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan pembukuan penatausahaan Pemerintah Daerah Provinsi NTT sudah baik dalam pelaksanaannya. Dari hasil rekapitulasi kusioner 61% jawaban responden terhadap pembukuan penatausahaan BMD adalah sangat setuju sedangkan jawaban setuju 38,7% dan netral 0,3%. Untuk itu perlu di tingkatkan lagi pemahaman pembukuan penatausahaan BMD agar lebih maksimal.

2. Berdasarkan Pengujian secara statistik memberikan bukti bahwa inventarisasi berpengaruh signifikan terhadap pengamanan BMD. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan inventarisasi penatausahaan BMD Pemerintah Daerah Provinsi NTT sudah baik dalam pelaksanaannya. Dari hasil rekapitulasi kusioner 56% jawaban responden terhadap inventarisasi penatausahaan BMD adalah sangat setuju sedangkan jawaban setuju 42,7% dan netral 1,3%. Untuk itu perlu di tingkatkan lagi pemahaman inventarisasi penatausahaan BMD agar lebih maksimal.
3. Berdasarkan Pengujian secara statistik memberikan bukti bahwa pelaporan berpengaruh signifikan terhadap pengamanan BMD. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan pelaporan penatausahaan BMD Pemerintah Daerah Provinsi NTT sudah baik dalam pelaksanaannya. Dari hasil rekapitulasi kusioner 78% jawaban responden terhadap inventarisasi penatausahaan BMD adalah sangat setuju sedangkan jawaban setuju 21,2% dan netral 0,8%. Untuk itu perlu di tingkatkan lagi pemahaman pelaporan penatausahaan BMD agar lebih maksimal.

Febrianti, Sukma. (2016). Analisis Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Ekonomi Manajemen*. 10 (1).

Rahayu, Ranti Noor. (2012). *Pengaruh Penatausahaan BMD terhadap Pengamanan Aset Daerah di Kabupaten Bandung*. Skripsi. Politeknik Negeri Bandung.

Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss*. 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Choiruddin. Zulkifli. Winarko, Hadi. Martini, Rita. 2019. Penatausahaan Barang Milik Daerah Untuk Pengamanan Barang Milik Daerah. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya*. 3 (1). ISSN: 2579-969X
- Sarlim, Rinaldi. dan Rahayu, Fitrah Sri. (2019). Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. *CELEBES EQUILIBRUM JURNAL*. 1 (1), 18-25 p-ISSN: 2685-5828 dan e-ISSN: 2685-4651